

PARTISIPASI ORGANISASI NON PEMERINTAH DALAM MENDORONG MEWUJUDKAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANTUL

Muhammad Nurcholish Imam^{1,2}, Ane Permatasari^{2,*}

¹Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Yogyakarta, Indonesia

²Pusat Studi SDG's, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

*Email: anepermatasari@umy.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan kerusakan lingkungan hidup di setiap daerah yaitu bersumber dari “sampah”. Dampak yang dihasilkan dari sampah yaitu mencemari udara, tanah dan air. Partisipasi masyarakat bergerak dalam peduli lingkungan merupakan aspek yang penting dalam menjaga tata kelola lingkungan hidup. Wahana Lingkungan Hidup merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak aktif dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam merespon permasalahan lingkungan khususnya pengelolaan sampah yang tidak dapat diatasi. Tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian bagaimana partisipasi Wahana Lingkungan Hidup dalam mendorong pemerintah untuk mewujudkan kebijakan lingkungan hidup. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan survei. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan sampah di Bantul tidak semata-mata terletak pada kesadaran masyarakat melainkan Kabupaten Bantul berfungsi sebagai hilirisasi dari dampak dalam hal pengelolaan sampah. Wahana Lingkungan Hidup memiliki peranan sebagai advokasi, pengawasan sosial dan penyampaian aspirasi dan kampanye publik. Selain itu Wahana Lingkungan Hidup juga memiliki kolaborasi dan kerjasama kepada pengelolaan lingkungan dan pendidikan. Namun dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan Surat Edaran Bupati untuk pelopor gerakan pilah sampah dari rumah dan pengelolaan sampah organik dengan metode biopori patut diapresiasi sebagai sebuah langkah strategis dalam manajemen sampah berbasis hulu.

Kata kunci: Kebijakan Lingkungan Hidup, Kabupaten Bantul, Pengelolaan Sampah

PARTICIPATION OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN PROMOTING THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL POLICIES IN BANTUL REGENCY

ABSTRACT

Environmental damage in every region stems from “waste.” The impact of waste is pollution of the air, soil, and water. Community participation in environmental awareness is an important aspect of maintaining environmental management. Wahana Lingkungan Hidup is a non-governmental organization that is actively involved in environmental issues in Indonesia. This should be a concern for the government in responding to environmental issues, especially waste management, which cannot be overcome. The purpose of this study is to examine how Wahana Lingkungan Hidup participates in encouraging the government to implement environmental policies. The research method used was qualitative, with data collection techniques through interviews and surveys. The results of this study show that the waste problem in Bantul does not lie solely in public awareness but rather that Bantul Regency functions as a downstream effect in terms of waste management. Wahana Lingkungan Hidup plays a role in advocacy, social supervision, and the delivery of aspirations and public campaigns. In addition, Wahana Lingkungan Hidup collaborates and cooperates in environmental management and education. Meanwhile, the government's potential responsiveness is still low, and its actual responsiveness is moderate. However, in this case, the Bantul Regency Government issued a Regent's Circular Letter pioneering the movement to sort waste from home and manage it.

Keywords: *Environmental Policy, Bantul Regency, Waste Management*

PERNYATAAN KUNCI

- Pengelolaan sampah di Bantul membutuhkan pendekatan kolaboratif yang berkelanjutan, di mana pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga fasilitator yang memberi ruang bagi masyarakat, swasta, dan organisasi masyarakat sipil seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) untuk terlibat secara setara.
- Keberhasilan upaya ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, penguatan kapasitas, dan komitmen bersama dalam membangun tata kelola sampah yang inklusif, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul perlu diarahkan pada penguatan sinergi antar pemangku kepentingan. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang berbasis partisipasi masyarakat dengan melibatkan komunitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sektor swasta dalam sistem pengelolaan sampah terpadu. Lebih lanjut, WALHI dapat diarahkan dengan menjalankan peran sebagai fasilitator komunikasi agar kepentingan masyarakat terakomodasi dalam perencanaan dan implementasi. Kebijakan harus menekankan pengurangan sampah sejak dari sumbernya melalui edukasi 3R (*reduce, reuse, recycle*), insentif bagi rumah tangga dan pelaku usaha yang melakukan pemilahan, serta penyediaan fasilitas pengolahan terpadu berbasis teknologi ramah lingkungan.

Selain itu, dukungan regulasi fiskal seperti insentif pajak atau kredit lunak bagi investor swasta dalam pengolahan limbah akan memperkuat keberlanjutan sistem. Dengan strategi ini, Kabupaten Bantul dapat mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, menekan dampak lingkungan, dan sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru dari sektor persampahan.

PENDAHULUAN

Eksplorasi terhadap pembangunan justru mengarah kepada kerusakan lingkungan dari dampak limbah, tata ruang kota dan pembangunan infrastruktur. Kualitas lingkungan hidup terus menurun diakibatkan karena pengelolaan lingkungan hidup yang tidak

berdasarkan norma dan kebijakan yang tidak merujuk kepada aspek lingkungan hidup (Qalbi 2023). Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sangat penting pengelolaan kebijakan lingkungan diatur secara baik dan bijaksana (Wibawa 2019).

Ada kemungkinan besar bahwa tindakan dan aktivitas manusia, seperti aktivitas pembangunan, akan mempengaruhi lingkungan dan sekitarnya, karena lingkungan sangat rentan terhadap tekanan dan perubahan fisik dan alami. Akibatnya, kualitas lingkungan akan menurun (Sutrisno *et al.* 2020). Hal ini menunjukkan kepada dari tindakan dan aktivitas yang dilakukan manusia tidak senantiasa berorientasi pada jangka panjang bahkan mengabaikan lingkungan sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap lingkungan (Khairina *et al.* 2020).

Selain itu permasalahan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di setiap daerah bersumber dari “sampah”. Kerusakan akibat sampah mencemari lingkungan dari desa terpencil hingga kota besar. Kerusakan lingkungan akibat sampah akibat kurangnya pengelolaan dapat menimbulkan penyakit bagi manusia (Fariz *et al.* 2025). Hal ini mengingat pertumbuhan populasi dan berbagai aktivitas turut mengakibatkan meningkatnya volume sampah (Sandora *et al.* 2011; Permatasari *et al.* 2022). Dampak yang dihasilkan dari sampah mencemari udara, tanah dan air. Rusaknya ekosistem yang mengancam keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia melalui air minum dan makanan (Nasution *et al.* 2025; Marisi *et al.* 2025), termasuk ekosistem daratan dan sungai (Arkham *et al.* 2014).

Partisipasi yang masyarakat bergerak dalam peduli lingkungan merupakan aspek yang penting dalam menjaga tata kelola lingkungan hidup. WALHI merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak aktif dalam menjaga lingkungan hidup. WALHI didirikan sesuai asas pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kinari 2024).

SITUASI TERKINI

WALHI di Kabupaten Bantul mengidentifikasi buruknya pengelolaan sampah yang ada pada Kabupaten Bantul. Dimana sampah yang dihasilkan lebih dari 1000 ton dan hanya dapat diolah 28,69%. Selebihnya 71,31% sampah yang berasal dari industri, rumah

tangga, fasilitas publik dan sebagainya tidak dapat dikelola dan bergantung kepada TPA Piyungan (Walhijogja 2025). Hal ini bisa dilihat Gambar 1.



Gambar 1. TPA Piyungan

Wangke (2023) menyatakan bahwa persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan apabila 70 % sampah dihasilkan dari rumah tangga yang sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai tambah seperti Pupuk Organik Cair (POC), kompos, atau energi biogas. Dengan demikian, pengelolaan sampah memiliki potensi untuk bertransformasi dari beban lingkungan menjadi sumber ekonomi baru yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam merespon permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bantul. Responsivitas pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan khususnya pengelolaan sampah yang tidak dapat diatasi. Hal ini sangat penting untuk dapat diatasi dalam mewujudkan kawasan kota dan tatanan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Menurut Orbawati dan Ahsani (2019) pada studi kasus di Kota Magelang, tiga dimensi utama yang ditunjukkan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat dalam responnya yaitu: *respon potensial* dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan; *respon aktual* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pengelolaan sampah; dan *respon sumber daya*, termasuk komitmen kelembagaan, teknis, dan pendanaan. Meskipun demikian, masalah seperti keterbatasan infrastruktur dan partisipasi masyarakat terus menghalangi pelaksanaan kebijakan.

Selain itu responsivitas merupakan suatu pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada pencemaran lingkungan yang kemudian dapat memberikan landasan operasional dalam pelaksanaan mengatasi 5R

(*Reduce, Reuse, Recycle, Replace dan Replant*). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu kajian WALHI Kabupaten Bantul dalam responsivitas pemerintah sangat menarik untuk menjadi penelitian. Sehingga dari adanya partisipasi WALHI dan responsivitas pemerintah dalam bergerak mengatasi permasalahan yang terjadi akan berdampak terhadap kebijakan lingkungan hidup di kawasan Kabupaten Bantul.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Lokasi ini dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan alasan pertimbangan partisipasi WALHI dalam mendorong pemerintah untuk mewujudkan kebijakan lingkungan di kawasan Kabupaten Bantul. Penelitian dilaksanakan pada Juli-September 2025.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, dilakukan wawancara kepada Bapak Hariyanto selaku Warga Binaan, Bapak Elki Setiyo Hadi selaku Ketua Divisi Kampanye dan Bapak Rizky Abiyoga selaku Anggota Divisi Kampanye. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah yaitu partisipasi WALHI dalam mendorong pemerintah untuk mewujudkan kebijakan lingkungan di Kabupaten Bantul.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mempelajari data yang mendukung penelitian dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan menggunakan dokumen yang ada bisa berupa buku harian, surat pribadi, media massa, laporan-laporan, serta sumber-sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam proses observasi, pengamat tinggal mencatat kegiatan-kegiatan yang ada pada WALHI.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu analisis data yang bersifat deskriptif dengan menekankan pada makna di balik data yang diperoleh di lapangan. Menurut Sugiyono (2017), kegiatan dalam analisis data meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama:

1. Reduksi Data

Tujuan dari reduksi adalah untuk menyederhanakan data agar tampak lebih jelas dan memudahkan proses pencarian serta pengorganisasian informasi (Kusumawati 2014).

2. Penyajian Data

Dengan menyajikan data yang telah melalui tahap reduksi, peneliti dapat memahami situasi secara lebih utuh dan mempertimbangkan keputusan berdasarkan interpretasi yang matang dari data yang tersedia.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses yang berkesinambungan, dan tidak dapat dipisahkan dari tahap-tahap sebelumnya. Oleh karena itu, ketiga tahapan ini saling terkait dan menjadi fondasi dalam menganalisis data secara sistematis, akurat, dan dapat dipahami dengan jelas (Kusumawati 2014).

Kerangka Logis

Partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 70 Ayat (2), mencakup tiga bentuk utama:

1. Pengawasan Sosial – Masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan lingkungan.
2. Penyampaian Aspirasi – Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, usulan, keberatan, atau pengaduan terkait kebijakan lingkungan.
3. Pelaporan Informasi – Masyarakat berperan dalam menyampaikan data atau laporan mengenai masalah lingkungan kepada pihak berwenang.

ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/PENANGANAN

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan kualitatif yang menekankan pada

pemahaman makna, proses, dan fenomena sosial lapangan, hal ini menyangkut peran WALHI dalam mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan kebijakan lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan sampah. Sebagaimana ditegaskan dalam metodologi penelitian, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga interpretasi hasil penelitian bersifat mendalam dan kontekstual, meskipun memiliki keterbatasan pada aspek kuantifikasi atau generalisasi data.

Penelitian ini didasari dari latar belakang bahwa permasalahan sampah di Kabupaten Bantul merupakan persoalan ekologis, sosial, dan kelembagaan yang kompleks. Kabupaten Bantul, sebagai wilayah hilir dari Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak hanya menanggung sampah yang berasal dari aktivitas warganya sendiri, tetapi juga menerima beban sampah dari wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Harianto selaku Warga Binaan WALHI menyatakan bahwa “kondisi ini diperparah dengan keterbatasan infrastruktur, minimnya pengelolaan terpadu, serta lemahnya regulasi yang mampu menekan tanggung jawab produsen maupun sektor swasta.”

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, WALHI Yogyakarta, khususnya melalui cabang-cabang kegiatannya di Bantul, berperan penting dalam melakukan advokasi, kampanye publik, hingga penyusunan strategi bersama warga dan pemerintah. Akan tetapi, Rizky Abiyoga selaku Staf Kampanye WALHI menyatakan bahwa peran tersebut tidak sepenuhnya mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul masih menunjukkan kebingungan dalam merumuskan peta jalan (*roadmap*) pengelolaan sampah yang terstruktur. Program yang berjalan cenderung bersifat reaktif, misalnya hanya menambah titik Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) tanpa ada mekanisme pengurangan dari hulu maupun sistem pemilahan yang konsisten.

Hal ini ditegaskan oleh Azizah (2023) bahwa penutupan TPA Piyungan di Bantul, Yogyakarta sejak 23 Juli 2023 menimbulkan penumpukan sampah yang tidak terkendali. Kebijakan ini dilakukan karena kapasitas TPA Piyungan telah melampaui daya tampungnya. Padahal, mekanisme pengelolaan sampah sebenarnya telah diatur cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun,

implementasinya masih jauh dari optimal. Menurut Nur, jika merujuk pada substansi UU tersebut, konsep yang ditawarkan sangat maju. Regulasi tersebut sudah mencakup prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), bahkan telah memasukkan konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR). Selain itu, perubahan nomenklatur dari tempat pembuangan akhir menjadi tempat pemrosesan akhir menegaskan bahwa idealnya hanya residu sampah yang seharusnya masuk ke TPA.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa persoalan sampah di Bantul tidak semata-mata terletak pada kesadaran masyarakat. Faktanya, masyarakat Bantul relatif memiliki kepedulian, meskipun tidak merata. Permasalahan utamanya terletak pada struktur dan distribusi pembangunan yang timpang antara Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul. Akumulasi kapital dan infrastruktur lebih terkonsentrasi di Sleman dan Kota Yogyakarta. Sementara Bantul berfungsi sebagai penampung dampak, termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Konteks ini memperlihatkan bahwa masalah sampah bukan hanya isu teknis, melainkan bagian dari persoalan keadilan lingkungan (*environmental justice*) yang berkaitan erat dengan distribusi beban dan manfaat pembangunan.

Berdasarkan Siagian *et al.* (2025), pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui sistem desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menegaskan bahwa setiap kabupaten memiliki kewenangan penuh dalam mengelola sampah di wilayah administrasinya masing-masing. Dalam kerangka kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan program “Bantul Bersih 2025” sebagai sebuah agenda strategis yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan. Program ini ditujukan untuk mewujudkan lingkungan bebas sampah melalui peningkatan efektivitas pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh. Melalui adanya keterlibatan berbagai pihak dalam tata kelola kolaboratif memungkinkan program atau kegiatan dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama (Permatasari dan Walinegoro 2023). Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang mengemuka meliputi keterbatasan sarana dan prasarana

pengangkutan sampah, kapasitas serta distribusi TPST yang belum optimal, hingga keterbatasan alokasi anggaran yang berdampak pada keberlanjutan pengelolaan sampah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang bersifat progresif dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan WALHI dalam pengelolaan sampah di Bantul dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Advokasi kebijakan melalui pengajuan peraturan daerah dan audiensi resmi dengan pemerintah.
2. Pengawasan sosial dengan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama dinas, memfasilitasi aspirasi masyarakat, hingga melakukan pemantauan kasus-kasus spesifik.
3. Kampanye publik dan edukasi dengan melibatkan sekolah, komunitas pemuda, dan festival lingkungan hidup untuk meningkatkan kesadaran generasi muda.
4. Kolaborasi kelembagaan dengan dinas pendidikan, kelurahan, hingga institusi kesehatan di sekitar TPA Piyungan.

Meskipun demikian, efektivitas partisipasi tersebut masih terbatas. Beberapa program pemilahan sampah, misalnya, meski sudah disosialisasikan pada 2022, ternyata gagal memberikan dampak signifikan karena sampah yang sudah dipilah tetap dicampur kembali dalam proses pengangkutan. Hal ini menyebabkan kekecewaan masyarakat sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Peran WALHI Dalam Advokasi Sampah di Kabupaten Bantul

Peran WALHI dalam isu pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul tidak hanya dapat dilihat sebagai bentuk keterlibatan sporadis, melainkan sebagai strategi advokasi yang terstruktur dengan basis hukum, politik, dan sosial. Peran WALHI tidak sekadar memberi tekanan kepada pemerintah daerah agar lebih responsif, melainkan juga bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan agenda kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, partisipasi WALHI di Bantul mencerminkan implementasi nyata dari prinsip *civil society*, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

menegaskan hak dan kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kualitas lingkungan.

1. Advokasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu bentuk utama partisipasi WALHI adalah melalui advokasi kebijakan. WALHI secara aktif mengajukan masukan terhadap regulasi daerah, misalnya pengajuan Peraturan Pengelolaan Sampah tahun 2013 yang bertujuan memberikan landasan hukum lebih jelas bagi tata kelola sampah di Kabupaten Bantul. Meskipun regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kebijakan turunan yang kuat, langkah ini menandai keterlibatan strategis WALHI dalam proses legislasi.

Selain itu, WALHI mendorong pemerintah untuk memiliki peta jalan (*roadmap*) pengelolaan sampah yang tidak hanya berbasis pada penampungan (*end of pipe*), tetapi juga mencakup upaya pengurangan dari hulu. WALHI menolak praktik pengelolaan sampah yang hanya menambah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) tanpa pengelolaan lanjutan, karena hal tersebut hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain. Desakan ini menunjukkan bahwa WALHI mengadopsi prinsip *preventive environmental policy*, yakni mengutamakan pencegahan pencemaran daripada sekadar penanganan.

Bentuk advokasi lain terlihat dari berbagai audiensi dan dialog formal yang dilakukan WALHI dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, bahkan hingga ke tingkat Bupati. WALHI juga beberapa kali melakukan somasi terkait pengelolaan sampah, meskipun implementasinya di lapangan masih terkendala. Advokasi ini berfungsi sebagai mekanisme *check and balance* agar pemerintah tidak hanya membuat kebijakan di atas kertas, tetapi juga memastikan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, advokasi ini menjadi penting untuk memberikan dorongan terhadap pemerintah dalam mewujudkan tata kelola sampah yang optimal dan memiliki nilai keberlanjutan. Hal ini didukung dengan narasi yang disampaikan oleh Elky Setiyo Hadi selaku Kepala Divisi Kampanye WALHI menyatakan bahwa alih-alih membangun sistem pemilahan dan pengolahan dari hulu, pemerintah cenderung mengambil langkah reaktif, yakni dengan menambah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) di berbagai titik. Hal ini hanya

memindahkan beban, tanpa menyelesaikan akar masalah. Bahkan ditemukan kasus di Pandansari, di mana sampah dibuang di pantai atas instruksi dinas, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah masih cenderung “darurat” dan tidak terencana (Jogja 2025).

Selain itu, upaya pemerintah dalam mendorong pemilahan sampah juga belum konsisten. Pada 2022, meski sudah ada konsep pemilahan, implementasinya justru mengecewakan masyarakat. Sampah yang sudah dipilah tetap dicampur kembali dalam proses pengangkutan, sehingga membuat masyarakat merasa sia-sia dan kehilangan motivasi untuk melakukan pemilahan. Hal ini mencerminkan lemahnya mekanisme kontrol dan supervisi dalam implementasi kebijakan.

2. Pengawasan Sosial

Sebagai bagian dari peran masyarakat sipil, WALHI menjalankan fungsi pengawasan sosial terhadap implementasi kebijakan lingkungan di Bantul. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya:

- a. Jasa layanan aduan melalui kanal <https://walhijogja.or.id/project/posko-pengaduan-masalah-sampah/> yang memungkinkan masyarakat melaporkan permasalahan sampah, baik terkait pembuangan ilegal maupun kegagalan pemerintah dalam mengelola titik tertentu.
- b. Forum Diskusi dan FGD (*Focus Group Discussion*) yang melibatkan dinas-dinas pemerintah. Dalam forum ini, WALHI tidak hanya memaparkan temuan lapangan, tetapi juga mendorong adanya rencana tindak lanjut bersama.
- c. Pemantauan langsung di lapangan, misalnya pada kasus sampah di Pantai Pandansari, di mana ditemukan praktik pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan standar lingkungan.

Pengawasan sosial menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan dorongan agar pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsi dalam memberikan layanan publik sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Secara keseluruhan, responsivitas pemerintah Kabupaten Bantul terhadap isu pengelolaan sampah masih dapat dikategorikan lemah. Hal ini sejalan dengan temuan (Napitupulu dan Muhyidin 2021) bahwa tantangan utama dalam tata kelola sampah kota berkelanjutan dengan menekankan

peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sebagai aktor kunci. Pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, sekaligus penyedia layanan persampahan melalui penyusunan regulasi dan kebijakan. Akan tetapi, kapasitas implementasi kebijakan tersebut masih terbatas akibat kendala sumber daya manusia, alokasi anggaran, serta lemahnya koordinasi lintas instansi. Di sisi lain, masyarakat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemilahan dan pengurangan sampah, justru menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah. Rendahnya kesadaran ekologis, kurangnya sosialisasi berkelanjutan, serta absennya insentif yang memadai membuat pemilahan sampah tidak konsisten. Rendahnya responsivitas pemerintah Bantul memiliki implikasi serius terhadap keberlanjutan kebijakan lingkungan. Pertama, kebijakan yang ada tidak mampu menciptakan perubahan perilaku masyarakat secara konsisten, karena tidak ada jaminan keberlanjutan.

Berdasarkan kondisi ini, peran WALHI menjadi semakin penting dalam menutupi kelemahan responsivitas pemerintah. Namun, jika pemerintah tidak meningkatkan kapasitas responsifnya, maka partisipasi WALHI pun tidak akan mencapai hasil optimal.

3. Penyampaian Aspirasi dan Kampanye Publik

Partisipasi WALHI juga ditunjukkan melalui strategi penyampaian aspirasi. WALHI menggunakan jalur formal berupa surat resmi, laporan kebijakan, serta audiensi langsung dengan pejabat pemerintah. Namun di sisi lain, WALHI juga mengoptimalkan jalur informal, seperti kampanye publik, gerakan anak muda, hingga penggunaan platform media sosial.

Kampanye publik dilakukan tidak hanya dalam bentuk protes atau pernyataan sikap, tetapi juga melalui pendekatan kreatif, misalnya festival lingkungan hidup yang melibatkan siswa SD di Ngablak untuk mengekspresikan isu lingkungan melalui seni. WALHI memahami bahwa perubahan budaya pengelolaan sampah tidak bisa hanya dilakukan dari atas (*top-down*), melainkan juga membutuhkan internalisasi nilai ekologis di tingkat generasi muda.

Selain festival, WALHI juga mengadakan *workshop* dan pelatihan di berbagai komunitas, seperti Pokja Kota dan *pilot project* di Bangunharjo. *Workshop* ini menekankan pada pengelolaan sampah organik, yang dianggap sebagai fraksi terbesar sampah di Bantul. Dengan mengajarkan

pembuatan kompos, WALHI berusaha menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak harus menunggu kebijakan pemerintah, tetapi bisa dimulai dari level rumah tangga dan komunitas.

4. Kolaborasi Kelembagaan

Partisipasi WALHI tidak berjalan sendiri, melainkan melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga. Hasil penelitian menunjukkan adanya kerja sama dengan:

- a. Kelurahan dan komunitas lokal, untuk mendukung program *pilot project* pemilahan sampah.
- b. Sekolah (SD Ngablak dan Piyungan), guna membentuk kesadaran sejak dini.
- c. Dinas Pendidikan, untuk memasukkan isu lingkungan ke dalam kegiatan edukatif.
- d. Institusi kesehatan di sekitar TPA, khususnya PKBI, yang berfokus pada pemeriksaan kesehatan kelompok rentan akibat dampak pencemaran sampah.

Pemerintah seharusnya mampu mengorkestrasi kolaborasi multipihak, tetapi realitas menunjukkan koordinasi yang lemah. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan sebenarnya sudah dilibatkan dalam program kerja sama dengan WALHI, tetapi kegiatan tersebut lebih banyak bersifat ad-hoc, bukan bagian dari strategi jangka panjang. Selain itu, birokrasi yang lamban membuat pemerintah kesulitan merespons inisiatif masyarakat. Misalnya, ada komunitas yang mengusulkan pendirian bank sampah resmi, tetapi proses perizinannya berbelit dan lama, sehingga menurunkan motivasi warga.

Menurut Utomo *et al.* (2024) peninjauan serta pembaruan peraturan daerah perlu dilakukan guna memperkuat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Regulasi yang lebih tegas terkait kewajiban pemilahan sampah, sistem retribusi, dan penerapan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan harus diberlakukan secara konsisten.

Meski demikian berdasarkan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Surat Edaran Bupati yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK, tenaga honorer, pegawai BUMN/BUMD, serta pamong kelurahan menjadi pelopor gerakan pilah sampah dari rumah dan pengelolaan sampah organik dengan metode biopori patut diapresiasi sebagai sebuah langkah strategis dalam manajemen sampah berbasis hulu (DPD RI 2025). Pendekatan ini sejalan dengan konsep *extended responsibility* dan *role model leadership*

dalam teori perubahan sosial, di mana aktor pemerintah berfungsi sebagai agen perubahan (*change agents*) untuk mendorong partisipasi publik yang lebih luas (Wilson *et al.* 2006).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Bantul, jumlah ASN di Kabupaten Bantul mencapai 6.154 orang pada akhir tahun 2024. Jumlah ini bukan hanya representasi birokrasi, tetapi juga potensi modal sosial yang signifikan untuk menggerakkan perubahan perilaku masyarakat. Dalam perspektif *behavioral governance*, keterlibatan ASN dapat menciptakan efek demonstratif (*demonstration effect*), di mana kepatuhan aparat birokrasi terhadap kebijakan lingkungan meningkatkan legitimasi dan diikuti oleh masyarakat (Guerrero *et al.* 2013).

Pada sisi kuantitatif, timbulan sampah harian Kabupaten Bantul diperkirakan mencapai 95 ton, dengan sekitar 75% berasal dari rumah tangga dan 50% di antaranya merupakan sampah organik. Dengan demikian, potensi sampah organik yang dihasilkan rumah tangga mencapai $\pm 47,5$ ton/hari. Apabila setiap ASN beserta keluarganya mampu melakukan pengurangan dan pengolahan sampah organik minimal 1 kg/hari melalui pemilahan dan penerapan biopori, maka potensi reduksi sampah organik dapat mencapai sekitar 6 ton/hari. Angka ini setara dengan hampir 7% dari total timbulan sampah harian Bantul.

Persentase reduksi tersebut dapat dianggap signifikan apabila dibandingkan dengan kapasitas pengelolaan TPA Piyungan yang saat ini mengalami kelebihan beban (*over capacity*). Artinya, intervensi di hulu melalui gerakan ASN ini berpotensi memberikan dampak sistemik terhadap berkurangnya beban sampah di hilir. Lebih jauh, implementasi kebijakan ini sejalan dengan pendekatan *zero waste hierarchy*, di mana pemilahan dan pengolahan organik menjadi prioritas utama dalam manajemen sampah berkelanjutan (Zaman dan Lehmann 2013).

Selain itu, keberhasilan program ini tidak hanya akan berdampak pada aspek teknis pengurangan timbulan, tetapi juga pada aspek sosial-budaya. ASN sebagai pelopor mampu memengaruhi norma sosial masyarakat untuk menjadikan pemilahan sampah sebagai praktik sehari-hari yang *embedded* dalam kehidupan rumah tangga (Arifin *et al.* 2012). Jika kebijakan ini dipatuhi secara konsisten dan direplikasi oleh masyarakat luas, maka gerakan ini dapat menciptakan transformasi struktural menuju pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang

lebih mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin HS, Munandar A, Schultin KG, Kaswanto RL. 2012. The Role and Impacts of Small-Scale, Homestead Agro-forestry Systems ("Pekarangan") on Household Prosperity: An Analysis of Agro-ecological Zones of Java, Indonesia. *International Journal of AgriScience* 2(10): 896-914.
- Arkham HS, Arifin HS, Kaswanto RL. 2014. Strategi Pengelolaan Lanskap Ruang Terbuka Biru di Daerah Aliran Sungai Ciliwung. *Jurnal Lanskap Indonesia* 6(1): 1-5. <https://doi.org/10.29244/jli.v6i1.18125>
- Azizah N. 2023. Jogja Darurat Sampah, Ahli UGM: Kenapa Baru Gaduh Sekarang? [DPD RI] Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2025. Apresiasi Gerakan Pilah Sampah di Bantul, Gus Hilmy: Solusi Konkret Masalah Sampah.
- Fariz RDA, Muis R, Anggraini A, Matsumoto T. 2025. The Shifting Sands of Waste: A Decadal Analysis of Illegal. *Journal of Environmental Behavior and Engineering* 3(1):1-14.
- Guerrero LA, Maas G, Hogland W. 2013. Solid Waste Management Challenges for Cities in Developing Countries. *Waste Management* 33(1): 220-32. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.09.008>.
- Khairina E, Purnomo EP, Malawnai AD. 2020. Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional* 26(2):155. doi:10.22146/jkn.52969.
- Kinari LN. 2024. Peran Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dalam Mencegah Pencemaran Akibat Sampah di Kabupaten Bantul. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kusumawati A. 2014. Peran Komunitas dalam Interaksi Sosial Remaja di Komunitas Angklung Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Marisi DP, Suprihatin S, Hariyadi S, Kaswanto RL. 2025. Seasonal Assessment of Water Quality and Pollution Index of Cileungsi River in Bogor Regency, Indonesia. *Jurnal*

- Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)* 15(4): 615-631. <https://doi.org/10.29244/jpsl.15.4.615>
- Napitupulu MD, Muhyidin A. 2021. Tantangan Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Sampah Kota Berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 17(4): 385–97. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.34438>.
- Nasution, Jannah M, Wulandari C, Wahono EP. 2025. Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terintegrasi: Studi Kasus tentang Efektivitas dan Relevansi dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Balitbangda. Ampungprov* 13(2):143–58.
- Orbawati EB, Ahsani RDP. 2019. Responsivitas Dinas Lingkungan Hidup dalam Pelayanan Persampahan di Kota Magelang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 7(1):34–46. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v7i01.35>.
- Permatasari A, Triyono, Walinegoro BG. 2022. Training on Processing Household Waste into Organic Liquid Fertilizer for PKK Cadres in Baturetno Village. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia* 2(4):134–40.
- Permatasari A, Walinegoro BG. 2023. Collaborative Governance in Realizing Smart Society as a Sustainable Stunting Reduction Effort in Sleman Regency. *E3S Web of Conferences* 440, 01010:1–13. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344001010>.
- Qalbi SN. 2023. Peran Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dalam Pengawasan Pengelolaan Karst Maros-Pangkep Universitas Hasanudin.
- Sandora RM, Kaswanto RL, Ahmad AG, Wulandari S, Ahmed A, Nugroho SB. 2011. Enlargement and Sustainability of Municipal Solid Waste Composting in Megacity: A Case Study for Surabaya City. *Journal of International Development and Cooperation (IDEC)* 18(2): 7-17. <https://doi.org/10.15027/32462>
- Siagian M, Putra AMA, Pratama A, Huda N. 2025. Waste Management and the Role of Local Government: The Experience of Bantul Regency. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 6(2):85–96. <https://doi.org/10.22219/aclj.v6i2.37263>.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutrisno AJ, Arifin HS, Kaswanto RL. 2020. Analisis Prediksi dan Hubungan antara Debit Air dan Curah Hujan pada Sungai Ciliwung di Kota Bogor. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)* 10(1): 25-33.
- Utomo ET, Ekayani, Abidin Z. 2024. Evaluasi Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dan Strategi Efektif Pengelolaan Sampah Kota Depok. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 11(2):74–82. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v11i2.57133>
- Walhi. 2025. WALHI dan FPG Tolak Pembuangan Sampah di Pantai Pandansari. <https://walhijogja.or.id/project/walhi-dan-fpg-tolak-pembuangan-sampah-di-pantai-pandansari/>.
- Walhi. 2025. WALHI Ajukan Surat Keberatan Atas Kegagalan Gubernur DIY dalam Pengelolaan Sampah di TPST Piyungan.
- Wangke F. 2023. Optimasi Faktor Modal Menunjang Lapangan Usaha Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 10(2): 100–111. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v10i2.48405>.
- Wibawa KCS. 2019. Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal* 2(1):79–92. doi:10.14710/alj.v2i1.79-92.
- Wilson DC, Velis C, Cheeseman C. 2006. Role of Informal Sector Recycling in Waste Management in Developing Countries. *Habitat International* 30(4):797–808. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2005.09.005>.
- Zaman AU, Lehmann S. 2013. The Zero Waste Index: A Performance Measurement Tool for Waste Management Systems in a ‘Zero Waste City.’ *Journal of Cleaner Production* 50:123–32. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.11.041>.